

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PENURUNAN STUNTING DI DESA LUBUK SANAI KECAMATAN XIV KOTO KABUPATEN MUKO-MUKO PROVINSI BENGKULU

Rafiq Kurniawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
rafiqkurniawan15@gmail.com

*Corresponding Author

Rahmadani Yusran

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
yusranrdy@fis.unp.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemerintah terkait dasar hukum penurunan stunting telah direncanakan sejak lama dan sudah diterapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, diperlukan sejumlah perbaikan yang lebih serius untuk mencapai realisasi yang nyata. Masalah alokasi dana untuk penanggulangan stunting menjadi sorotan di beberapa daerah di Indonesia. Melihat bagaimana pentingnya alokasi dana untuk penurunan stunting di suatu daerah seperti tema penelitian saat ini disebut desa yaitu di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. Desa ini menunjukkan komitmen serius dalam penanggulangan stunting dengan mengalokasikan 8% dari dana desa tahun 2022 untuk melakukan intervensi khusus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa untuk penurunan stunting di desa Lubuk Sanai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang diperoleh di lapangan mengenai bagaimana efektivitas alokasi dana desa Lubuk Sanai untuk upaya penurunan stunting. Hasil penelitian menunjukkan meskipun program ini telah memberikan dampak positif bagi upaya menurunkan angka stunting, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Bantuan uang tunai dan sembako makanan sehat yang diberikan telah membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak stunting, namun besaran bantuan yang berfluktuasi akibat prioritas pembangunan lain mempengaruhi efektivitas program ini. Selain itu, pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa untuk penurunan stunting di Desa Lubuk Sanai telah melalui berbagai tahap evaluasi, mulai dari perancangan awal dengan kegiatan Rembuk Stunting hingga pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Rembuk Stunting melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan berbasis data dan sesuai kebutuhan lapangan.

Kata Kunci: Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Stunting

ABSTRACT

Government policies regarding the legal basis for reducing stunting have been planned for a long time and have been implemented. However, in its implementation, a number of more serious improvements are needed to achieve real realization. The problem of allocating funds for stunting prevention is in the spotlight in several regions in Indonesia. Seeing how important it is to allocate funds for reducing stunting in an area, such as the current research theme in a village, namely Lubuk Sanai Village, XIV Koto District, Mukomuko Regency. This village shows a serious commitment to tackling stunting by allocating 8% of village funds in 2022 to carry out special interventions in this area. This research aims to analyze the

implementation of village fund allocation policies to reduce stunting in Lubuk Sanai village. In this research, the author uses a qualitative approach using a descriptive method that describes the background of observations, actions, people and conversations obtained in the field regarding the effectiveness of Lubuk Sanai village fund allocation for efforts to reduce stunting. The research results show that although this program has had a positive impact on efforts to reduce stunting rates, there are a number of challenges that must be faced. The cash assistance and healthy food supplies provided have helped meet the nutritional needs of pregnant, breastfeeding mothers and stunted children, however the amount of assistance fluctuates due to other development priorities affecting the effectiveness of this program. In addition, the implementation of the village fund allocation policy to reduce stunting in Lubuk Sanai Village has gone through various evaluation stages, starting from initial design with Rembuk Stunting activities to ongoing monitoring and evaluation. The Stunting Consultation involves various stakeholders to ensure policies are data-based and meet field needs.

Keywords: *Effectiveness, Village Fund Allocation, Stunting*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan kekurangan gizi kronis yang timbul karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama, yang disebabkan oleh pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting bisa muncul sejak janin masih dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak mencapai usia dua tahun (Kementerian Kesehatan, 2016). Faktor-faktor seperti kemiskinan (Utami, Ramadhanintyas, and Hariningsih 2022), tingkat pengetahuan (Rahmawati and Harahap 2022), pola pengasuhan (Sahroji, Hidayat, and Nababan 2022), bencana alam (Satriawan 2018), ketersediaan pangan (Permanasari et al. 2020), dan layanan kesehatan, pada akhirnya bermuara pada permasalahan kebijakan ekonomi dan politik suatu negara sebagai akar permasalahan utama (Nurfatimah et al. 2021).

Penggunaan Dana Desa untuk menangani stunting dapat dimulai dengan melakukan pemetaan target secara partisipatif terhadap warga desa yang memerlukan perhatian khusus dalam penanganan stunting oleh para kader pemberdayaan di desa. (Lela, Haeruddin, and Amelia 2023). Selain itu, pembahasan alokasi dana desa untuk mengatasi stunting juga tercakup dalam regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, terdapat penegasan bahwa penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa adalah untuk penurunan stunting guna mewujudkan desa yang sehat dan sejahtera (Prihatini and Subanda 2020). Provinsi Bengkulu, sebagai salah

satu wilayah di Indonesia, menunjukkan adanya prevalensi stunting pada balita. Menurut data Entry Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tahun 2019, persentase balita stunting mencapai 8,98%. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 11,7%, namun perlu diperhatikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 8,40%. Fakta ini menunjukkan adanya dinamika dalam permasalahan stunting di Provinsi Bengkulu (Anugra et al. 2023).

Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu, terdapat tren penurunan jumlah balita stunting dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019, persentase stunting mencapai 10,64%, mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 11,03%, serta menurun pula dari tahun 2017 yang sebesar 11,65% (Safitra, Yuliani, and Tofandi 2021). Meskipun terdapat perbaikan dalam angka ini, namun Pemerintah Kabupaten Muko-muko masih terus berupaya untuk menekan jumlah tersebut melalui intervensi penanganan stunting dan melakukan advokasi untuk mendapatkan dukungan, khususnya dalam bentuk regulasi yang bersifat lebih operasional.

Dalam permasalahan stunting di Provinsi Bengkulu diantaranya, Pertama Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses sanitasi dan air bersih. Data menunjukkan bahwa sekitar 25,9% penduduk Bengkulu tidak memiliki akses air bersih, sementara 63,8% tidak mendapatkan sanitasi yang layak. Kondisi ini berdampak pada buruknya kebersihan dan kesehatan, yang menjadi faktor risiko utama terjadinya stunting. Kedua, banyak ibu di Bengkulu yang tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan tidak memberikan makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi dan seimbang (Hermawati and Sastrawan 2020). Praktik pemberian makan yang tidak sesuai dengan pedoman kesehatan dapat berdampak langsung pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang stunting juga menjadi kendala. Sebagian besar masyarakat di Bengkulu belum sepenuhnya memahami apa itu stunting dan dampaknya terhadap kesehatan serta perkembangan anak (Bunyamin and Syahrier 2024). Peningkatan literasi kesehatan dan sosialisasi mengenai pentingnya penurunan stunting menjadi hal yang mendesak. Selain itu, keterbatasan

layanan kesehatan dan posyandu menjadi hambatan. Keempat, kurangnya keterpaduan dalam program penanganan stunting menjadi tantangan serius. Koordinasi dan sinergi antar sektor terkait dalam pelaksanaan program penurunan dan penanganan stunting masih kurang optimal. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, sektor kesehatan, pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan program yang terpadu dan berkelanjutan guna mengatasi masalah stunting di Provinsi Bengkulu.

Tabel 1. Jumlah Bayi yang lahir dengan gizi buruk

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Bayi Lahir <i>Births</i>	Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) <i>Low Birth Weights (LBW)</i>	Gizi Kurang <i>Malnutrition</i>
Bengkulu Selatan	2 631	51	113
Rejang Lebong	4 759	98	119
Bengkulu Utara	5 167	256	728
Kaur	2 197	46	209
Seluma	3 259	71	346
Mukomuko	3 503	103	244
Lebong	1 856	36	73
Kepahiang	2 291	89	198
Bengkulu Tengah	2 031	47	235
Kota Bengkulu	6 749	63	115
Bengkulu	34 443	860	2 380

Sumber/ Source: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Dari jumlah bayi yang lahir, terdapat sebanyak 103 bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Dari total 3503 bayi yang lahir, sebanyak 244 bayi mengalami kondisi gizi buruk. Kondisi gizi buruk pada bayi dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Oleh karena itu, perlunya penanganan khusus dan perhatian serius terhadap ibu hamil dan bayi baru lahir di Kabupaten Mukomuko untuk mencegah dan mengatasi stunting.

Selama alokasi dana desa untuk penanganan stunting di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Muko-Muko masih banyak masyarakat yang mengalami dan penurunan stunting yang belum mencapai tujuan di mana hanya mampu menjangkau untuk 20 orang saja. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan di Desa Lubuk Sanai, terdapat beberapa permasalahan penanganan stunting melalui alokasi dana desa diantaranya : Pertama, masih belum maksimalnya alokasi dana untuk penanganan stunting di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Muko-Muko, karena dana yang di sediakan untuk

penanganan stunting hanya 8% dari anggaran. Kedua, kurangnya bervariasinya bantuan penurunan stunting yang diberikan kepada masyarakat. Ketiga, masih belum rutusnya kegiatan posyandu untuk masyarakat dan masih terkendala oleh kurangnya kelancaran dalam pelaksanaannya, yang secara utama dipengaruhi oleh keterbatasan dana atau anggaran.

STUDI LITERATUR

1. Konsep Efektivitas Kebijakan

Menurut Patrio Sutopo dalam Mayadri (2017:3) Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan. Dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi (Syamsuadi et al. 2023). Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kualitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai (Kamal Alamsyah (2016:65).

Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai atau diimplementasikan apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci; program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut (Syamsuadi et al. 2022). Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya serta lingkungan (environment) (Syamsuadi et al. 2020). Lingkungan saling mempengaruhi sehingga implementasi kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif dan subjektif dari perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari praktek empiriknya (Yuliato Kadji, 2015:78).

2. Konsep Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik terdapat beberapa perbedaan definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli. Kebijakan publik menurut Dye (1987) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak melakukan (is what ever governments choose to do or not to do). Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya)

dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Arisandi, Syamsuadi, and Trisnawati 2023). Pendapat dari Dye tersebut juga sama halnya dengan pendapat Jenkins (1978) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai "proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah dan berbagai pihak lainnya untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu" (Hartati, Syamsuadi, and Arisandi 2020). Jenkins menekankan pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, yang mirip dengan definisi Dye yang menekankan pada pilihan pemerintah. Sama halnya dengan pendapat Dye dan Jenkins, kebijakan publik juga didefinisikan oleh Jones (1997) yang mengatakan kebijakan publik sebagai "serangkaian tindakan yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah baik akan dilakukan ataupun tidak dilakukan yang mempunyai tujuan dan berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat".

3. Alokasi Dana Desa untuk Stunting

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (Syamsuadi 2023), dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Syamsuadi and Febriani 2023). Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD Kabupaten/ Kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat (Sanusi & Djumlani, 2019). Berdasarkan Permendes No. 13 Tahun 2023 BAB II yang menjabarkan mengenai Fokus penggunaan dana desa untuk stunting skala desa untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting meliputi :

- a. Penyuluhan dan konseling gizi
- b. Pemantauan tumbuh kembang balita
- c. Pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) – 59 bulan
- d. Penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif
- e. Sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) – 24 bulan.
- f. Pelatihan pengelolaan makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) menggunakan pangan lokal.
- g. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa untuk penurunan stunting di desa Lubuk Sanai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang diperoleh di lapangan mengenai bagaimana efektivitas alokasi dana desa Lubuk Sanai untuk upaya penurunan stunting. Data dalam penelitian ini di kumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan yang baru dilakukan. Untuk menilai tingkat stunting, pola pengeluaran dana desa, intervensi kesehatan yang telah dilakukan, dan persepsi masyarakat terhadap program-program yang ada. Penulis dapat mengumpulkan data wawancara langsung terkait dampak dari kebijakan alokasi dana desa di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Muko-Muko.

Selain itu, dalam penelitian ini, data sekunder dapat mencakup studi dokumentasi terkait statistik kesehatan dari dinas kesehatan setempat, data sensus atau survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait profil demografi dan sosial ekonomi Desa Lubuk Sanai, laporan tahunan atau bulanan dari pemerintah daerah terkait anggaran dan alokasi dana desa, serta studi literatur yang relevan tentang intervensi penurunan stunting di daerah serupa.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa untuk penurunan stunting di Desa Lubuk Sanai

a. Pemberian bantuan berupa uang tunai

Sejak tahun 2022, pemerintah desa telah menetapkan jumlah bantuan yang diberikan, yakni Rp 250.000 per bulan untuk ibu hamil dan Rp 300.000 per bulan untuk keluarga dengan anak stunting, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Lubuk Sanai. Bantuan ini diberikan secara rutin setiap bulan dengan tujuan memberikan dukungan berkelanjutan kepada keluarga yang membutuhkan. Jumlah ini diatur berdasarkan kebutuhan dasar untuk mendukung pemenuhan gizi yang lebih baik bagi ibu hamil dan anak-anak.

Namun, besaran bantuan ini mengalami perubahan seiring waktu, menyesuaikan dengan kondisi dan prioritas lain yang harus dihadapi oleh pemerintah desa. Perubahan jumlah bantuan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur desa dan penanganan situasi darurat. karena adanya kebutuhan mendesak lain seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan penyediaan air bersih, pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi anggaran. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa harus mengelola anggaran dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa semua kebutuhan dapat dipenuhi tanpa mengorbankan program-program penting lainnya.

b. Pemberian bantuan makanan sehat

Pemberian bantuan berupa sembako makanan sehat oleh pemerintah desa Lubuk Sanai merupakan salah satu strategi penting dalam upaya menurunkan angka stunting di desa tersebut. Oleh karena itu, selain bantuan uang tunai, pemerintah desa juga memberikan paket sembako yang terdiri dari beras, telur, sayuran, dan buah-buahan segar. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal, dengan melibatkan kader posyandu.

Gambar 1.

Pembagian Bantuan Stunting di Desa Lubuk Sanai



Sumber : Arsip Desa Lubuk Sanai

Bantuan sembako ini diberikan dengan periode tertentu yang diatur secara terstruktur. pemerintah desa membagi periode bantuan menjadi dua bagian setiap tahunnya. Selama tiga bulan pertama, bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga yang membutuhkan, sementara tiga bulan berikutnya bantuan dialokasikan dalam bentuk paket sembako makanan sehat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga penerima bantuan dapat memanfaatkan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli makanan sesuai kebutuhan, sementara pada periode selanjutnya mereka mendapatkan bahan makanan bergizi dari paket sembako yang diberikan.

c. Kegiatan Posyandu dan Penyuluhan Stunting

Kegiatan posyandu yang rutin diadakan oleh pemerintah Desa Lubuk Sanai memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak di desa tersebut. Di posyandu, berbagai layanan kesehatan seperti penimbangan, pemeriksaan gizi, dan penyuluhan tentang pola makan bergizi dilakukan secara rutin setiap bulan. Petugas kesehatan dan kader posyandu bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa ibu hamil dan balita mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, edukasi tentang pemberian ASI eksklusif, pentingnya imunisasi, dan pola makan seimbang juga diberikan untuk mencegah stunting dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan posyandu dan penyuluhan tentang stunting adalah keterbatasan dana desa. Keterbatasan dana menyebabkan kegiatan

posyandu hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam dua bulan. Hal ini tentu berdampak pada konsistensi dan efektivitas program dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah desa berusaha untuk tetap konsisten dalam melaksanakan kegiatan ini, namun diperlukan dukungan tambahan untuk memastikan kegiatan posyandu dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Gambar 2.

Kegiatan Posyandu dan Penyuluhan Stunting oleh Puskesmas
Desa Lubuk Sanai



Sumber : Arsip Puskesmas Desa Lubuk Sanai

Selain itu, ketersediaan obat dan vitamin yang memadai untuk pemeriksaan kesehatan rutin juga sering kali menjadi masalah. Kendala ini tentu berdampak pada kualitas layanan yang diberikan di posyandu, sehingga diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan fasilitas dan sarana yang memadai. Dukungan tambahan dari pemerintah desa dan pihak terkait sangat diperlukan untuk mengatasi kendala ini dan meningkatkan kualitas layanan posyandu.

1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa untuk Penurunan Stunting di desa Lubuk Sanai

a. Perancangan sebelum pelaksanaan kebijakan (*Ex- ante evaluation*)

Proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Desa Lubuk Sanai dimulai dengan kegiatan "Rembuk Stunting" yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan strategi yang efektif dalam menangani masalah stunting di desa tersebut. Rembuk Stunting membahas data kebutuhan anak-anak penerima

bantuan stunting serta menetapkan tenaga kesehatan dan bidan yang diperlukan. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. pentingnya melibatkan perangkat desa, puskesmas, dan bidan desa dalam forum diskusi ini. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, Rembuk Stunting menjadi wadah koordinasi yang efektif dalam membahas kondisi stunting di Desa Lubuk Sanai. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini memastikan bahwa setiap aspek dari masalah stunting, termasuk faktor penyebab dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dapat diidentifikasi dan dipahami secara menyeluruh.

Gambar 3
Rembuk Stunting



Sumber : Dinas Kesehatan Mukomuko

Salah satu kegiatan utama dalam Rembuk Stunting adalah pengkajian data prevalensi stunting serta faktor-faktor yang menyebabkannya. Data ini menjadi dasar untuk memahami sejauh mana masalah stunting terjadi di Desa Lubuk Sanai dan apa saja yang menjadi pemicu utamanya. Implementasi kebijakan yang telah disusun melalui Rembuk Stunting dilakukan dengan koordinasi yang ketat antara Dinas Kesehatan, perangkat desa, dan tenaga kesehatan setempat. Setiap intervensi dan program yang direncanakan diimplementasikan dengan mengacu pada strategi yang telah disepakati bersama. Proses ini memerlukan kerjasama yang solid dan komunikasi yang terus-menerus antara semua pihak yang terlibat. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif dalam penurunan angka stunting di Desa Lubuk Sanai.

b. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Lubuk Sanai (*on going evaluation*)

Alokasi dana desa untuk penanganan stunting di Desa Lubuk Sanai telah dirancang secara sistematis melalui kegiatan “Rembuk Stunting.” Salah satu indikator utama yang menjadi fokus alokasi dana adalah honor untuk kader posyandu. Kader posyandu merupakan ujung tombak dalam pemantauan dan pelaksanaan program stunting di lapangan. Mereka adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, melakukan pengukuran rutin, serta memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya gizi seimbang.

Selain honor kader posyandu, alokasi dana desa juga diarahkan untuk bantuan makanan tambahan bagi anak-anak dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi. Dana desa juga dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang stunting. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk puskesmas, bidan desa, dan kader kesehatan, yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan cara-cara pencegahan stunting.

Selain alokasi dana desa, penanganan stunting di Desa Lubuk Sanai juga didukung oleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Dana BOK digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi kesehatan, pemberian makanan tambahan, inovasi pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, dan penimbangan posyandu untuk bayi dan balita. Pengelolaan dana BOK ini menjadi bagian integral dari upaya penurunan stunting, memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan didukung oleh sumber daya yang memadai dan dikelola secara transparan dan akuntabel.

c. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa untuk stunting (*Ex-post evaluation*)

Evaluasi terhadap kebijakan penurunan stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah desa untuk menilai efektivitas upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan, tetapi juga pada efisiensi penggunaan sumber daya dan respons masyarakat terhadap program-program kesehatan yang telah diterapkan. Dengan mengevaluasi berbagai aspek tersebut, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari program yang telah dijalankan

serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting ke depannya.

Meskipun desa sudah sangat siap dalam hal SDM dan sarana prasarana, masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat terkait fasilitas yang diberikan. Bantuan yang disalurkan masih dirasa kurang memadai dan kegiatan posyandu yang fokus pada penyuluhan dan sosialisasi stunting belum berjalan secara rutin. Angka stunting di Kabupaten Mukomuko masih berada pada kategori yang tinggi, yaitu sebesar 27,01% pada tahun 2024. Untuk mencapai indikator standar SKI suatu daerah yang bisa dikatakan zona hijau dari stunting, angka tersebut harus menurun hingga mencapai 19% pada tahun 2029. Target ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai penurunan angka stunting yang signifikan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah desa dan masyarakat Desa Lubuk Sanai tetap berkomitmen untuk terus berupaya menurunkan angka stunting. Dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif, diharapkan program penurunan stunting dapat berjalan lebih baik ke depannya.

KESIMPULAN

Bantuan uang tunai dan sembako makanan sehat yang diberikan telah membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak stunting, namun besaran bantuan yang berfluktuasi akibat prioritas pembangunan lain mempengaruhi efektivitas program ini. Kegiatan posyandu dan penyuluhan stunting juga memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan masyarakat, namun konsistensi pelaksanaan dan keterbatasan dana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif, evaluasi terus-menerus, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa untuk penurunan stunting di Desa Lubuk Sanai telah melalui berbagai tahap evaluasi, mulai dari perancangan awal dengan kegiatan Rembuk Stunting hingga pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Rembuk Stunting melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan berbasis data dan sesuai kebutuhan lapangan. Dana desa digunakan untuk honor kader

posyandu, bantuan makanan tambahan, dan kegiatan sosialisasi, dengan dukungan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan.

REFERENSI

- Anugra, Y. S, A Sumarlan, Y Yusmaniarti, and U Khair. 2023. "Analisis Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Maras Nalisis Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten .)" *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi* 4(1): 47–57.
- Arisandi, Diki, Amir Syamsuadi, and Liza Trisnawati. 2023. "Policy Brief-Model Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Teknologi Informasi Di Kabupaten Siak."
- Bunyamin, Bubung, and Fajar Alan Syahrier. 2024. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Riau: Studi Di Kabupaten Rokan Hulu." *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora* 2(1): 21–27.
- Hartati, S, A Syamsuadi, and D Arisandi. 2020. "Kebijakan Publik: Refleksi Sektor Pendidikan."
- Hermawati, Hermawati, and Sastrawan Sastrawan. 2020. "Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda* 8(2): 48–54. doi:10.37824/jkqh.v8i2.2020.223.
- Lela, N, H Haeruddin, and A. R Amelia. 2023. "Hubungan Penggunaan Dana Desa Dengan Penurunan Kasus Stunting Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang." *Journal of Muslim Community Health* 4(4): 170–83.
- Nurfatimah, N, P Anakoda, K Ramadhan, C Entoh, S. B. M Sitorus, and L. W Longgupa. 2021. "Perilaku Pencegahan Stunting Pada Ibu Hamil." *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan* 15(2): 97–104.
- Permanasari, Yurista, Meda Permana, Joko Pambudi, Bunga Christitha Rosha, Made Dewi Susilawati, Ekowati Rahajeng, Agus Triwinarto, and Rachmalina S. Prasodjo. 2020. "Tantangan Implementasi Konvergensi Pada Program Pencegahan Stunting Di Kabupaten Prioritas." *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 30(4): 315–28. doi:10.22435/mpk.v30i4.3586.
- Prihatini, D, and I. N Subanda. 2020. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4(2): 46–59.
- Rahmawati, Tuti, and Heryudarini Harahap. 2022. "The Intervention Service Coverage on Convergence Action to Reduce Stunting in Riau Province Priority

Districts, Indonesia.” *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences* 10(T8): 200–206.

Safitra, L, F Yuliani, and A Tofandi. 2021. “STUNTING PREVENTION PROGRAM IN NORTH BENGKULU REGENCY.” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 10(2): 119–29.

Sahroji, Qotrun Nada, Rahmat Hidayat, and Rudyk Nababan. 2022. “Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Pemerintah dan Politik* 7(1): 34–39.

Satriawan, Elan. 2018. “Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024.” (November): 1–32.

Syamsuadi, Amir. 2023. “Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu.” 6(1): 1–30.

Syamsuadi, Amir, Diki Arisandi, Seri Hartati, Liza Trisnawati, Luluk Elvitaria, and Sapto Setyo Nugroho. 2023. “Kebijakan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Di Riau.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(6): 8436–50.

Syamsuadi, Amir, and Ade Febriani. 2023. “The Influence Of Stunting Reduction Program Performance On The Growth Of Under-Free Children In Rokan Hulu District.” *JIKA (Jurnal Ilmu Kesehatan Abdurrab)* 1(2): 27–38.

Syamsuadi, Amir, Seri Hartati, Liza Trisnawati, and Diki Arisandi. 2020. “Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).” *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 2(2): 114–28.

Syamsuadi, Amir, Harni Sepriyani, Susi Endrini, and Ade Febriani. 2022. “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Abdurrab Pada Program Magang Mahasiswa.” *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4(1): 1341–48.

Utami, Yeni, Karina Nur Ramadhanintyas, and Yetti Hariningsih. 2022. “Pendidikan Kesehatan Pada Ibu Hamil Dalam Pencegahan Stunting Pada Balita.” *APMa Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(2).